

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 145
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.
- Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi dalam pendidikan anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hlm 24
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 12–13.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41–43.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23–25.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1–2.
- Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 151–153.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90–92.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 417–419.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 23
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan

- Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23–25
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23–25.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 54–56.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Kencana, Jakarta hlm. 28–31.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: liberty hlm.32
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-9, Ichtiar Baru–Van Hoeve, Jakarta, hlm. 20–21.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 219–221.
- Gustav Radbruch, 1950, *Rechtsphilosophie*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Oxford University Press, Oxford, hlm. 107–109.
- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, University of California Press, Berkeley, hlm. 193–195.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa. Bandung, hlm.15
- Kurniawan L, 2003, *Menyingkap Korupsi di daerah*, In-trans, Jakarta, hlm 15.
- L.J. van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan ke-30, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24–26.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102–104.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36–38.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58–60.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 821–822.
- Mardiyati, S., 2022, *Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang*

- Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disiplin*, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,,hlm. 215-220.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*,Refika Aditama, Bandung hlm. 19
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27–29.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 108.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72–73.
- Moeljatno, 2018,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54–56.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm. 18-21
- Muhammad Yusuf,2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 27.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm.1
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 12–15.
- P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 23
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 36
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181–183.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Asset Recovery dan Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Korupsi*, Kencana, Jakarta,hlm. 15–18.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Korupsi, Good Governance, dan Sistem Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 55–58.
- Romli Atmasasmita. 2001. “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta Stora Grafika, hlm. 204–210.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 153
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181–183.
- Simons, 2015, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, dikutip dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitiann Hukum Normatif*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm.13.
- Soerjono Soekanto, 2008, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8
- SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 204–210.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan ke-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160–161.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hlm. 108–110.
- Sutan Reny Sjahdeini, 2004, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 39-50
- Utrecht, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 20–22.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 251.
- Yenti Ganarsih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Penucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.15

JURNAL

- Anisa Putri, S.E., M.M., Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan, Vol. 3 No. 1 (2012): JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi terdapat dalam <https://doi.org/10.33558/jrak.v3i1.142> diakses pada tanggal 17 November 2025.

- Aprillani Arsyad, 2014, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 1-2, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43276-IDanalisis-yuridis-penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, terdapat dalam, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 14 April 2025.
- Bionda Johan Anggara dan Warsifah, 2022, “*Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara*,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4, hlm. 1253. Terdapat dalam <https://jiip.stkipyapisdomp.u.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/555>, diakses pada tanggal 15 april 2025.
- Bionda Johan Anggara dan Warsifah, 2022, Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* volume 5, no. 4, hlm. 1250-1259, terdapat dalam <https://jiip.stkipyapisdomp.u.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/555>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026
- Bionda Johan Anggara dan Warsifah, 2022, “*Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)*,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* volume 5, no. 4, hlm. 1250- 1259, terdapat dalam <https://jiip.stkipyapisdomp.u.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/555?utm>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026
- Dwi Atmoko dan Amalia Syauket,”*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*,” *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 2,

Desember 2022, hlm. 181- 182, terdapat dalam <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/30>, diakses pada tanggal 21 november 2025.

Fauzan Azima Faturachman, dkk. “Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 4, No. 2, Mei 2024, hlm. 202-203, terdapat dalam, <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/731>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Gustav Radbruch, 1946, “Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht”, *Süddeutsche Juristen Zeitung*, Vol. 1, hlm. 105- 108, terdapat dalam <https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/9678> diakses pada tanggal 10 Januari 2026

Gustav Radbruch, 1946, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, dalam Radbruch’s Formula yang dikutip oleh Stanley L. Paulson, 1995, “Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 15, No. 3, hlm. 489–491, terdapat dalam <https://doi.org/10.1093/ojls/15.3.489>, diakses pada tanggal 15 april 2025.

Gustav Radbruch, 2006, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*)”, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, hlm. 1–11, terdapat dalam <https://academic.oup.com/ojls/article/26/1/1/1505665>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/42089

Lonna Yohanes Lengkong, 2023, *Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum tora*: 9 (3), hlm. 351-364, terdapat dalam <https://ejournal.fhuki.id/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fejournal.fhuki.id%2Findex.php%2Ftora%2Farticle%2Fdownload%2F278%2F107%2F917#page=1&zoo m=90,-56,850> diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

Ruslan, 2022, *Penjelasan Mahkamah Agung soal Vonis Nihil*, terdapat dalam: <https://www.datariau.com/detail/berita/penjelasan-mahkamah-agung-soal->

[vonis-nihil](#), diakses pada tanggal 10 Januari

Sapti Prihatmini, 2023, Dominikus Rato, & Bayu Dwi Anggono, *Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi dan Validitas dalam Perspektif Ronald Dworkin, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, no.2, terdapat dalam dalam https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/42089, diakses pada tanggal 16 Januari 2026

Sumber Internet :

“Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal Vonis Nihil Heru Hidayat: Ada Ketidakadilan di Mata Publik,” DetikNews, 18 Januari 2022, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5905641/jaksa-agung-soal-vonis-nihil-di-skandal-asabri-keadilan-publik-terusik?utm>

Boyamin Saiman, tanggapan terhadap pidana nihil dalam kasus Heru Hidayat, dikutip dalam: “Boyamin Saiman Sebut Heru Hidayat Layak Hukuman Seumur Hidup daripada Mati,” Kompas.com, 8 Desember 2021, terdapat dalam <https://rm.id/bacaberita/nasional/103360/diapresiasi-maki-tuntutan-hukuman-mati-buat-terdakwa-kasus-asabri-heru-hidayat?utm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Entri: Korupsi*. Terdapat dalam: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 April 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kasus Jiwasraya dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Terdapat dalam: <https://www.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 14 April 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. terdapat dalam: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. terdapat dalam: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2025

Tindak Pidana menurut KBBI. Terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tindak>, diakses

pada tanggal 21 Januari 2026.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

